

BAB V

KESIMPULAN

Antara Turki dengan Israel telah memiliki hubungan diplomatik sejak lama, yang diawali dengan Turki sebagai negara mayoritas Muslim yang menyatakan kedaulatan Israel pada sekitar Maret 1949. Adanya alasan pertama Turki membangun kerjasama bilateral dengan Israel adalah karena ideologi liberal (barat) yang diterapkan pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk pada saat itu, setelah keruntuhan kekhalifahan Ottoman pada tahun 1923. Kemudian pada tahun 2002, Turki sudah memulai untuk menyusun strategi-strategi dalam politik luar negerinya, dan memulai untuk mencari keuntungan dari letak geografisnya, mengingat posisi strategis yang dimiliki Turki, dan Israel menjadi salah satu mitra dalam bekerjasama.

Seperti yang diketahui bahwa Palestina dan Turki mengalami konflik setelah adanya serangan Mavi Marmara pada tahun 2010 di perairan Gaza. Hal ini membuat warga Turki marah dan mengecam tindakan Israel. Oleh sebab itu, pemerintah Turki langsung menghentikan segala kerjasama yang telah dilakukan dengan Israel, termasuk kerjasama ekonomi dan militer. Turki mengusir duta besar Israel, dan menarik duta besarnya dari Israel. Hal ini merupakan bentuk kekecewaan Turki atas Israel, mengingat banyaknya warga Turki yang menjadi korban dalam Mavi Marmara.

Namun, setelah beberapa tahun berlangsung dan banyaknya pertimbangan, kedua negara sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 2016. Kondisi ekonomi Turki yang bersifat fluktuatif membuat Turki memerlukan mitra dalam mendorong ekonominya. Dalam hal ini Israel menjadi satu-satunya negara yang berpotensi untuk mendorong ekonomi Turki. Kemudian dengan kondisi militer Turki yang sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup, tetap memerlukan bantuan Israel dalam membantu dan melengkapi kebutuhan persenjataan militer Turki.

Adanya alasan mengenai pengambilan kebijakan keputusan hubungan diplomatik Turki terhadap Israel kemudian menjadi poin penting dalam penelitian ini. Melalui teori pilihan rasional Graham T. Allison, adanya pertimbangan aspek politik dalam negeri, kondisi ekonomi, militer dan konteks internasional digunakan sebagai tolak ukur dalam mencari tahu alasan Turki melakukan normalisasi. Hal ini dikorelasikan sebagai pertimbangan untung rugi dalam melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam aspek politik dalam negeri, parlemen sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, yang juga harus diiringi dengan keputusan presiden republik. Dalam sistem parlementer, adanya keperluan konsensus dan pertimbangan yang besar melalui presiden merupakan hal yang mutlak bagi pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki sendiri.

Kemudian yang terakhir adalah aspek internasional. Adanya tekanan dari Amerika Serikat dianggap sebagai konteks internasional yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik Turki terhadap Israel. Adanya tekanan yang diberikan kepada kedua negara menyebabkan Turki mempertimbangkan untuk memperbaiki hubungan diplomatik Turki dengan Israel.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan parlemen dan pertimbangan presiden, kondisi ekonomi Turki yang bersifat fluktuatif, adanya keinginan Turki dalam menambah kekuatan militer, dan adanya tekanan dari Amerika Serikat menjadi alasan bagi Turki dalam melakukan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2016.